



MENGOPTIMALKAN POTENSI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBELAJARAN BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA



Penyunting:
Dr. A. Totok Priyadi, M.Pd.
Dr. H. Martono

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan
MENGOPTIMALKAN
POTENSI KEARIFAN LOKAL
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA,
SASTRA, SENI, DAN BUDAYA
All rights reserved
© 2013, Indonesia: Pontianak

Penyunting
Dr. A. Totok Priyadi, M.Pd.
Dr. H. Martono

Publishing
STAIN Pontianak Press
Jl. Letjend Soeprapto No. 19 Pontianak 78121
Tel./Fax. (0561) 734170

Cetakan Pertama, Agustus 2013

MENGOPTIMALKAN
POTENSI KEARIFAN LOKAL
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA,
SASTRA, SENI, DAN BUDAYA
Pontianak: STAIN Pontianak Press, Agustus 2013
xiv+760 Page, 21cm x 29,6 cm

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Mahakasih karena berkat dan karunia-Nya dapat terbit buku "Mengoptimalkan Potensi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya". Buku ini merupakan kumpulan makalah yang diseminarkan dalam rangka kegiatan Seminar dan Rapat Tahunan BKS PTN Wilayah Barat 2013 (Semirata BKS PTN Barat 2013) yang diselenggarakan pada tanggal 10 - 11 September 2013 di Hotel Orchard A. Yani, Pontianak, Kalimantan Barat. Jumlah makalah yang masuk dan layak untuk diterbitkan sampai dengan hari dan tanggal yang telah ditentukan ada 58 judul dengan isi yang bervariasi tetapi masih mengacu pada satu tema yakni kearifan lokal.

Sebagai warisan leluhur, kearifan lokal adalah kekayaan budaya dan tradisi besar yang tidak saja harus dipertahankan atau dilestarikan tetapi sudah sepantasnya dihargai dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal perlu dihargai dan dilaksanakan bukan saja oleh masyarakat setempat pemilik budaya tetapi juga oleh masyarakat pendatang dan pemerintah daerah di mana kearifan lokal berada. Kearifan lokal mengacu kepada berbagai kekayaan budaya yang bertumbuhkembang dalam masyarakat, dikenal, dan dipercayai serta diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat. Dengan melaksanakannya secara konsisten berarti bahwa anggota masyarakat dan pemerintah menghargai dan melestarikan kearifan lokal yang menjadi tradisi dan warisan serta kekayaan budaya masyarakat.

Kearifan lokal atau *local wisdom* haruslah dipahami sebagai basis sosial yang memiliki kekuatan penggerak dalam berbagai hal termasuk dinamika konflik yang tidak usai-usai. Mengoptimalkan potensi kearifan lokal merupakan alternatif solusi dari pendekatan budaya dalam mengatasi konflik. Dalam pandangan Haba (2007:334-335) kearifan lokal mempunyai enam fungsi. Pertama, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Kedua, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan. Ketiga, kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas (*top down*) tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu daya ikatnya lebih mengena dan bertahan. Keempat, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. Kelima, *local wisdom* akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas *common ground*/kebudayaan yang dimiliki. Keenam, kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan,

DAFTAR ISI

No.	Identitas Makalah	Halaman
1.	MEMANFAATKAN JATI DIRI NUSANTARA YANG TERDAPAT PADA BUDAYA SUKU BANGSA BAGI KEPENTINGAN PENDIDIKAN Prof. Dr. Yus Rusyana Universitas Pendidikan Indonesia	1
2.	KEARIFAN LOKAL SEBAGAI KEKUATAN KULTURAL MEMBENTUK PERADABAN Dr. Pudentia MPSS Dosen FIB UI dan Ketua Asosiasi Tradisi Lisan	11
3.	GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA YANG PROFESIONAL Dr. Martono Dosen FKIP Universitas Tanjungpura	21
4.	PERAN KABA DALAM PENGUKUHAN SISTEM MATRILINEAL DI MINANGKABAU Musfeptial, S.S., M.Hum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	37
5.	PENGETAHUAN INTERDISIPLINARITAS TIDAK BAKU PADA PELAJARAN SENI DAN BUDAYA; STUDI KASUS PELAJARAN SENI MUSIK PADA PENDIDIKAN DASAR DI SUMATERA Yos Sudarman, S.Pd., M.Pd. Dosen FBS Universitas Negeri Padang	47
6.	KEARIFAN LOKAL DALAM FABEL BANJAR Agus Yulianto Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	64

DAFTAR ISI

No.	Identitas Makalah	Halaman
1.	MEMANFAATKAN JATI DIRI NUSANTARA YANG TERDAPAT PADA BUDAYA SUKU BANGSA BAGI KEPENTINGAN PENDIDIKAN Prof. Dr. Yus Rusyana Universitas Pendidikan Indonesia	1
2.	KEARIFAN LOKAL SEBAGAI KEKUATAN KULTURAL MEMBENTUK PERADABAN Dr. Pudentia MPSS Dosen FIB UI dan Ketua Asosiasi Tradisi Lisan	11
3.	GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA YANG PROFESIONAL Dr. Martono Dosen FKIP Universitas Tanjungpura	21
4.	PERAN KABA DALAM PENGUKUHAN SISTEM MATRILINEAL DI MINANGKABAU Musfeptial, S.S., M.Hum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	37
5.	PENGETAHUAN INTERDISIPLINARITAS TIDAK BAKU PADA PELAJARAN SENI DAN BUDAYA; STUDI KASUS PELAJARAN SENI MUSIK PADA PENDIDIKAN DASAR DI SUMATERA Yos Sudarman, S.Pd., M.Pd. Dosen FBS Universitas Negeri Padang	47
6.	KEARIFAN LOKAL DALAM FABEL BANJAR Agus Yulianto Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	64

7.	PANDANGAN KOSMOS DAN SISTEM NILAI DALAM TAKNA LAWE Albert Rufinus Dosen FKIP Universitas Tanjungpura	83
8.	EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM NOVEL BIDADARI-BIDADARI SURGA KARYA TERE LIYE Amanah Hijriah Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	100
9.	PERSPEKTIF KURIKULUM 2013 DALAM PEMBELAJARAN BAHASA Arono Dosen FKIP Universitas Bengkulu	109
10.	KRITIK SOSIAL DALAM ANTOLOGI CERPEN SISWA TAHUN 2012 "SENANDUNG GELOMBANG KAPUAS" Binar Kurniasari Febrianti Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	124
11.	KOMUNIKASI MELALUI SIMBOL (Studi pada Masyarakat Dayak Iban) Dr. Clarry Sada, M.Pd Dosen FKIP Universitas Tanjungpura	136
12.	BELAJAR NILAI-NILAI EKOLOGIS DARI PATUNG PRIMITIF BATAK Dr. Daulat Saragi, M.Hum. Dosen FBS Universitas Negeri Medan	145
13.	FUNGSI BATU DALAM CERITA BATU MAK JAGE Dewi Juliastuty Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	162
14.	MENGUAK NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DAYAK DALAM NOVEL <i>BATAS</i>	171

	Dian Nathalia Inda, S.Pd. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	
15.	A Case Study: THE IMPLEMENTATION OF A STUDENT-CENTERED APPROACH IN TEACHING READING IN ENGLISH THE UNIVERSITY OF SUMATERA INDONESIA. ERNI Riau University, Indonesia Dr. Hamidah Binti Yamat, M.A National University, Malaysia	185
16.	PENINGKATAN KEMAMPUAN MAHASISWA PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS FKIP UNIVERSITAS RIAU DALAM MENGIDENTIFIKASI ELEMEN-ELEMEN PLOT DALAM DRAMA PENDEK MELALUI PEMBELAJARAN KOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION Drs. Syafri. K. M.Hum. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau	201
17.	PENERAPAN TEKNIK "FREEWRITING" SEBAGAI AKTIFITAS "BRAINSTORMING" UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS ESAI PADA PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS FKIP UNRI Eliwarti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau	219
18.	ANALISIS NILAI PENDIDIKAN DAN RELIGI YANG TERKANDUNG DALAM SASTRA SUFISTIK MASYARAKAT LEMBAK BENGKULU Emi Agustina Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu	235
19.	BENTUK SAPAAN DAN FATIS ETNIS MINANGKABAU DAN TIONGHOA (CINA): Upaya Penciptaan Saling Paham untuk Pencegahan Konflik dan Disintegrasi Bangsa Ermanto Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang	246

20.	<p>PROSES PENGIMBUHAN DALAM BAHASA BIDAYUH-SOMU KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p>EUSABINUS BUNAU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura</p>	259
21.	<p>PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) PADA SISWA KELAS VII A DI SMP NEGERI 1 SINGKAWANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012.</p> <p>Eva Purwanti SMP Negeri 1 Singkawang</p>	272
22.	<p>STRATEGI BERBAHASA GURU TAMAN KANAK-KANAK AL-KAUSAR PONTIANAK KETIKA BERTINDAK TUTUR DIREKTIF KEPADA MURID</p> <p>Evi Novianti Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat</p>	288
23.	<p>CONTENT, ORGANIZATION, AND LANGUAGE (COL): A CURRENT, INTEGRATED RUBRIC FOR THE CORRECTION OF WRITING SKILL</p> <p>FadlyAzhar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau</p>	303
24.	<p><i>ENSANGAN</i> MASYARAKAT DAYAK KERABAT KABUPATEN SEKADAU</p> <p>HERLINA Program Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Tanjungpura</p>	312
25.	<p>MEDAN MAKNA AKTIVITAS TANGAN MENYAKITI BAHASA MELAYU DIALEK PONTIANAK</p> <p>Ida Herawati Balai Bahasa Kalimantan Barat</p>	327

26.	<p>FOSTERING STUDENTS' LANGUAGE SKILLS AND CHARACTER FORMATION THROUGH COLLABORATIVE DIGITAL STORYTELLING</p> <p>Ida Rosmalina Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya</p>	336
27.	<p>NAMA MARGA ETNIK TIONGHOA SEBAGAI PENANDA PENETAPAN KETURUNAN DALAM SISTEM KEKERABATAN ETNIK TIONGHOA DI PONTIANAK</p> <p>Irmayani Balai Bahasa Kalimantan Barat</p>	341
28.	<p>MENJADIKAN SASTRA DAERAH SEBAGAI PRIMADONA</p> <p>Izzah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya</p>	353
29.	<p>MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA MAHASISWA DENGAN STRATEGI MEMBACA KOLABORATIF (SMK) PADA MAHASISWA B. INGGRIS FKIP UNIVERSITAS BENGKULU (UNIB)</p> <p>Kasmaini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu</p>	366
30.	<p>POTENSI KEARIFAN LOKAL DALAM SASTRA LISAN MINANGKABAU PERBATASAN</p> <p>Dr. Drs. Khairil Anwar, M.Si. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas</p>	383
31.	<p>KONTEKSTUALISASI SASTRA KALIMANTAN BARAT (MERETAS RUANG-RUANG SASTRA KEKINIAN)</p> <p>Khairul Fuad Balai Bahasa Kalimantan Barat</p>	393
32.	<p>MENUMBUHKEMBANGKAN KEMAMPUAN TRANSLOKALITAS PENGAJARAN SASTRA DALAM PENDIDIKAN KARAKTER NASIONALISME KEBANGSAAN</p>	409

	Muhammad, Al-Hafizh, S.S., M.A. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang	
33.	REVITALIZING ETHNIC LANGUAGES TO KEEP YOUNG PEOPLE LOVE ITS LITERATURE, ARTS, AND CULTURE Margaretha Dinar Sijinjak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya	419
34.	BILINGUALISME ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BINA ANAK BANGSA KOTA PONTIANAK Martina Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	428
35.	LANGUAGE LEARNER TRAINING PROGRAM SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DI UP2B UNIVERSITAS RIAU Drs. Masyhur, M.Ed Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau	439
36.	EUFEMISME DALAM UNGKAPAN TRADISIONAL DAERAH MELAYU DI JAMBI Rustam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi	451
37.	PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN KONJUNGSI DALAM KALIMAT MAJEMUK BAHASA INDONESIA MELALUI TEKNIK SIMULASI Nantje Harijatiwidjaja Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	462
38.	RITUAL NYOBENG ETNIS DAYAK BIDAYUH MENJADI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT WILAYAH PERBATASAN BERPOTENSI MEMBANGUN KARAKTER BANGSA Nata Margareta Program Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Tanjungpura	472

39.	<p>UNGKAPAN MAKIAN DALAM NOVEL TRILOGI RONGGENG DUKUH PARUK KARYA AHMAD TOHARI</p> <p>Nindwihapsari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat</p>	486
40.	<p>PROFIL KEBAHASAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI SEBAGAI GAMBARAN AWAL MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI BAHASA</p> <p>Drs. Andiopenta Purba, M. Hum.M. Div. Universitas Jambi</p>	499
41.	<p>NILAI DIDAKTIS DALAM CERITA <i>CIDO-CIDO KALIKI</i></p> <p>Nurelide Balai Bahasa Medan</p>	513
42.	<p>REPRESENTASI INDONESIA DALAM FILM <i>BRANDAL-BRANDAL CILIWUNG</i></p> <p>Resti Nurfaidah Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat</p>	525
43.	<p>MODEL SILABUS BAHASA INDONESIA BERBASIS <i>CLIL</i></p> <p>Ria Ariesta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu</p>	541
44.	<p>MENSINERGIKAN BAHASA DAN SASTRA DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER MAHASISWA MELALUI KEGIATAN FORUM <i>LITERATURE FOR ALL</i></p> <p>Dr. Rita Inderawati, M.Pd. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya</p>	551
45.	<p>PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBICARA (SPEAKING) MAHASISWA PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS MELALUI METODE <i>COOPERATIVE LEARNING</i></p> <p>Rosnasari Pulungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu</p>	564

46.	KEARIFAN LOKAL DALAM PANTUN BANJAR Saefuddin Balai Provinsi Kalimantan Selatan	581
47.	PEMBELAJARAN TRADISI LISAN DAN KEARIFAN LOKAL: KASUS <i>BALAMUT</i> Sainul Hermawan FKIP Universitas Lambung Mangkurat	598
48.	GURITAN: UPAYA PENGENALAN, PELESTARIAN, DAN PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA Suhardi Mukmin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya	615
49.	MENINGKATKAN BAHASA INGGRIS PEMBELAJARAN GURU BAHASA INGGRIS (<i>IMPROVING ENGLISH TEACHERS' CLASSROOM LANGUAGE IN TEACHING LEARNING PROCESS</i>) Supriusman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau	630
50.	KARAKTER DALAM UNGKAPAN DAN PERIBAHASA BAHASA SUNDA Umi Kulsum Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	644
51.	KONTEKSTUALISME DONGENG BINATANG PADA BUKU AJAR BAHASA INDONESIA SEKOLAH DASAR Wahyu Damayanti Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	662
52.	STRUKTUR DAN MAKNA <i>ABAKNG BALUNGKUR</i> CERITA RAKYAT DAYAK KANAYATN Dr. A. Totok Priyadi, M.Pd FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak	672

53.	MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MELALUI PEMAHAMAN BACAAN PADA MAHASISWA BAHASA INGGRIS FKIP UNTIRTA Dr. Yudi Juniairdi, M.Pd. FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	688
54.	PENGEMBANGAN KURIKULUM KETEATERAN YANG BERCERMIN PADA KEARIFAN LOKAL Dra. Hj. Yusra D., M.Pd. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi	696
55.	PERBANDINGAN KEMAMPUAN MENULIS PANTUN MAHASISWA PBUD DENGAN MAHASISWA SNMPTN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FKIP UNIVERSITAS RIAU Drs. Syafrial, M.Pd Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau	710
56.	PERTUNJUKAN <i>SALUANG JO DENDANG</i> DALAM KONTEKS " <i>BAGURAU</i> " DI MINANGKABAU Syeilendra, S.Kar., M.Hum Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang	726
57.	PENDIDIKAN NILAI MORAL DI PERGURUAN TINGGI MELALUI KUMPULAN DONGENG PRANCIS BERBASIS KEARIFAN LOKAL Ninuk Lustyantie FBS Universitas Negeri Jakarta	735
58.	MENGENAL PUISI WARNA LOKAL JAMBI SEBAGAI MATERI PENGAJARAN SASTRA ERA OTONOMI DAERAH H. Yundi Fitrah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi	750

PENGETAHUAN INTERDISIPLINARITAS TIDAK BAKU PADA PELAJARAN SENI DAN BUDAYA; STUDI KASUS PELAJARAN SENI MUSIK PADA PENDIDIKAN DASAR DI SUMATERA

oleh Yos Sudarman, S.Pd., M.Pd.

sudarmanmisterjejet@gmail.com

Dosen Pendidikan Seni Musik Jurusan Sendoritasik FBS Universitas Negeri Padang
untuk Kertas Kerja Semirata Wilayah BKS-Bara Bidang Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya
di FKIP Untan-Pontianak Kalimantan Barat

10 – 11 September 2013

Abstrak

Usaha peningkatan kualitas pembelajaran Seni Budaya jenjang pendidikan dasar (SD-SMP), tetap akan stagnasi, sepanjang hanya terfokus pada pengembangan kompetensi guru bidang studi S1 Seni Budaya di SD/SMP atau men-sarjana-kan Guru Kelas di SD. Berdasarkan subjek yang diteliti, yaitu pada populasi guru yang mengajar pada pendidikan dasar di Sumatera, terindikasi ketidaksengajaan dalam proses transformasi pengetahuan musik yang mencampuradukan konsep, sebagaimana kerap ditemukan pada guru yang tetap melanjutkan warisan pengajaran musik SD-SMP tamatan SPG-PGSMTMP. Dengan menggunakan metode deskriptif secara survei, ditemukan bahwa perbedaan kompetensi keilmuan dan tidak mengakarnya konsep musik muatan lokal pada Guru Bidang Studi/Guru Kelas, kerap memaksanya melakukan improvisasi dalam penyampaian materi ajar. Sehingga gejala interdisiplinartitas (*interdisciplinarity*) yang tidak baku (*non-reciprocal*) tidak bisa dihindari. Sepanjang notasi angka masih populer pada pelajaran musik di pendidikan dasar, gejala interdisiplinartitas akan terus terjadi. Praksisnya, siswa akan tetap tidak mengerti, karena terbiasakan untuk melakukan *cross-thinking* dalam memahami angka sebagai bilangan pada ilmu hitung (matematik) dan sebagai notasi musik. Interdisiplinartitas Musik-Ilmu hitung ini telah merubah gaya belajar kongkrit ke abstrak layaknya orang dewasa. Hasilnya, penggunaan notasi angka berlebihan pada pelajaran musik di SD-SMP tidaklah membangun kompetensi siswa, malahan menyimpang dari yang digagas *Guido Arrezzo* di awal abad X Masehi. Kesempulanya, pemaknaan belajar musik di SD-SMP yang tidak fundamental, *prestige meanded*, tidak aktual, dan dianggap pelajaran pelengkap ini, secara kurikulum perlu ditopang dengan campuran Jurusan/Prodi S1 Seni Musik/Sendoritasik, termasuk ilmu komunikasi-bahasa, sehingga pembelajarannya menjadi menarik dan tidak membingungkan.

A. Pendahuluan

Sejarah telah mencatat bahwa geliat pendidikan di Indonesia mulai terasa menyentuh kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan kaum pekerja dan intelek, yakni pada masa pendidikan di zaman kolonial Jepang. Sebagai bagian dari *policy* politik etis pamong

praja koloni Jepang, sekolah-sekolah pribumi di zaman pra-kemerdekaan tetap diizinkan melakukan kegiatan pendidikan meski bergerak secara terbatas dan dalam pengawasan pemerintah Jepang. Melalui sebuah jawatan yang disebut *Naimubu*, yang membawahi kantor Pengajaran bernama *Bankyo Kyoku*, pemerintah Jepang memberikan sebagian mandat kepada kaum intelek pribumi untuk mengatur pelaksanaan pendidikan, dengan tetap menjaga kepentingan politik pemerintah Jepang di Indonesia. Pasca kemerdekaan tahun 1945, denyut nadi pertumbuhan awal pendidikan di Indonesia akhirnya dipengaruhi oleh idealisme pemikiran tokoh sentral pendidikan nasional kharismatik saat itu, di mana sebagian pemikirannya tumbuh dan berkembang saat mengecap kebebasan mengembangkan pendidikan di zaman Jepang. Sebut saja Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Syafei, yang sempat menjabat Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama dan kedua pasca kemerdekaan. Tapi usia jabatan mereka amat singkat yaitu selama dua tahun antara kurun 1945–1946. Namun begitu, keduanya telah berhasil meletakkan pondasi pembangunan pendidikan Indonesia yang baru saja merdeka.

Sebagai negara yang berdaulat dan masih bergejolak merapatkan barisan atas rongrongan mantan kolonial, tidak dipungkiri jika sendi-sendi kehidupan berbangsa pada saat itu senantiasa dalam kecamuk patriotisme yang tinggi, termasuk memanasifasikan nilai-nilai patriotisme itu ke dalam tujuan pendidikan nasional. Semangat ini dapat dilihat pada kepustakaan arsip nasional, ketika tujuan pendidikan Indonesia yang “menanamkan jiwa patriotisme”, begitu nyata tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan tanggal 1 Maret 1946. Sebagai eksekusi dari suasana politik pasca perang yang belum menentu, tujuan pendidikan Indonesia sempat mengalami perubahan hingga lima kali menjelang tahun 1950. Baru setelah pengakuan kedaulatan pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, akhirnya tujuan pendidikan nasional mulai memikirkan babak “Indonesia dengan semangat membangun yang baru”, yang dinyatakan melalui Undang-undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan secara lugas bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran Indonesia adalah “Membentuk manusia susila yang cakap, dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.”

1. Pendidikan Dasar dalam Kilasan Sejarah

Maksud penulis untuk menyingkap kilasan sejarah pendidikan di Indonesia sebagaimana yang dipaparkan di atas, sesungguhnya hendak mengilustrasikan kembali jika rancang bangun pendidikan Indonesia sejak masa kemerdekaan sampai akhir 1950-an, amat dipengaruhi oleh: (a) sistem persekolahan yang telah diperkenalkan sejak era *Bankyo Kyoku* di masa Jepang; (b) pemikiran tokoh nasional kharismatik; dan (c) gejolak revolusi fisik perang kemerdekaan. Meskipun pada masa kolonial Belanda, sistem persekolahan ala Eropa (*Europese stijl scholing*) telah dirasakan kaum pribumi dan bangsawan, apalagi semenjak terbitnya tulisan propaganda “*Max Havelaar*” (1890) yang ditulis *Eduard Douwes Dekker*, seorang sastrawan berjuluk “*Multatuli*”, yang misinya dilanjutkan pula oleh *Ernest Douwes Dekker* seorang wartawan “*Danudirja Setiabudi*” guna mendukung pergerakan kemerdekaan Indonesia, namun penempatan tiga jenjang pendidikan persekolahan secara jelas pada: pendidikan dasar (教育初等) → pendidikan lanjutan (教育二次)

→ dan pendidikan tinggi (高等教育) justru banyak diadopsi dari sistem pendidikan negara “matahari terbit” ini. Namun sayangnya, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikumandangkan, rekaman sejarah pembangunan sistem pendidikan di Indonesia di ketiga jenjang pendidikan itu justru timpang atau tidak berimbang. Pendek kata, pembangunan pondasi pendidikan nasional pada pendidikan dasar dan menengah, yang pernah digadang-gadangkan di zaman Ki Hajar Dewantara dan Mohammad Syafei, seketika tidak terarah manakala politik prestisius era-Orde Lama lebih mengedepankan pembangunan pendidikan tinggi.

Betapa tidak, andaikata pemerintah zaman Orde Lama sejak awal memperhatikan pertumbuhan dan kelayakan pembangunan pendidikan dasar, yang *notabene* dianggap sebagai poros pendirian pilar-pilar pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, tentunya kesemrawutan pendidikan dasar di Indonesia tidak seperti sekarang ini. Pada sisi berbeda, jika kita mau bercermin ke sejarah pendidikan dari negara-negara yang sudah maju, jelas apabila “*trademark*” pendidikan yang paling dijagokan pertama kali adalah pendidikan dasar. Indonesia justru sebaliknya, lebih memilih untuk mengeksploitir pendidikan tinggi yang terkesan “tergesa-gesa” di era 1960-an itu. Pada era prestisius “pertubuhan PTN” zaman Sukarno, pemerintah berhasil mendongkrak berdirinya 42 (empat puluh dua) buah perguruan tinggi negeri di hampir setiap ibukota propinsi di Indonesia. Sedangkan pada saat yang sama, Malaysia masih di bawah koloni Inggris dan masih membangun infrastruktur pendidikan dasar dan menengah. Saat Malaysia menerima kemerdekaan dari Pemerintah Inggris di tahun **1957**, Malaysia tidak segan-segan untuk mengimpor guru dari Indonesia guna memacu perkembangan kualitas pendidikan dasar dan menengah negeri Jiran tersebut. Sepertinya pemerintah Malaysia saat itu belum perlu mendirikan perguruan tinggi, karena para calon sarjana bisa disekolahkan ke luar negeri. Tampaknya strategi pendidikan Malaysia ini cukup berhasil. Ingat saja fakta sejarah di paruh akhir 70-an, para kaum terpelajar Malaysia yang telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri kembali ke Indonesia, guru dari Indonesia yang sejak awalnya berpredikat “guru *seremp*” tadi dihadapkan pada dua pilihan. Jika bermutu, dipersilakan beralih kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia dan tetap mengabdikan di sana. Jika kurang bermutu, dipersilakan juga untuk kembali ke tanah air.

2. Kesadaran untuk Membangun Pendidikan Dasar

Lalu sejak kapan Indonesia sadar dengan pembangunan pendidikan dasar yang akhirnya disadari amatlah penting itu? Cikal bakalnya baru terlihat agak kentara di era Orde Baru zaman Suharto, yaitu pada masa peletakan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) ke-II di tahun 1974. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan lima tahun, pembangunan pendidikan dasar di Indonesia mulai mendapat perhatian agak serius. Namun kritik terselubung terhadap pola pembangunan pendidikan dasar yang diusung Suharto juga bermunculan, dikarenakan program unggulan pendidikan dasar itu bukan pada pembangunan sumberdaya manusianya alias mutu SDM “guru SD”-nya, tapi lebih mencanangkan program Instruksi Presiden (Impres) Sekolah Dasar untuk *menebut* pembangunan fisik bangunan sekolah. Alhasil, mulai dari kota sampai desa, masuk kampung ke luar kampung, dari ibukota kecamatan hingga dusun, ditemukan bangunan SD Impres dengan kondisi yang serbaneka. Mumpuni jika SD itu dibangun oleh

pemborong yang jujur, mungkin sosok bangunan SD itu masih ada sampai kini. Kalau pemborongnya nakal, tak sedikit pembangunan SD Impres yang konon menyedot APBN itu berakhir pada bangunan SD bertabir bambu, yang lambat laun hilang ditelan waktu karena sengaja dihapuskan, di-*marger* dengan SD lain karena tidak layak operasional, tidak ada guru, maupun kekurangan siswa.

Dampak psikososial dari pola pembangunan pendidikan Indonesia yang lebih memacu pembangunan pendidikan yang lebih tinggi di era 60-an, sedikit banyaknya telah menimbulkan pencitraan masyarakat yang tidak sepadan antara citra “guru SD” dengan guru-guru pendidikan menengah dan dosen di perguruan tinggi. Sejak kapan bangsa Indonesia menganggap bapak dan ibu guru SD yang kerap diplesetkan dengan “ibu Budi dan Bapak Budi” itu pada posisi yang adiluhung? Cukupkah jasa mereka dihargai hanya pada sebatas syair lagu klasik 80-an yang kerap diputar di TVRI, “*Kita jadi bisa, menulis dan membaca, karna siapa? Kita jadi tahu, beraneka bidang ilmu, karna siapa? Kita Jadi pintar, dibimbing pak guru. Kita bisa pandai, dibimbing bu guru. Guru bak pelita, di dalam gelap gulita. Jasamu tiada tara*”. Jawabnya tentulah tidak. Padahal, jika bangsa ini mau menciptakan generasi pembangunan yang handal sejak usia dini, perhatikan nasib guru SD sejak sekarang. Guru SD yang kita harapkan ke depan itu tentunya memiliki kelayakan hidup yang memadai, pendidikan dan perjenjangan karir yang jelas, yang akan bermuara pada peningkatan kualitas pembelajaran dari pelajaran yang diajarkannya di sekolah dasar.

B. Permasalahan

1. Dilema Guru Kelas dalam Pembelajaran Seni Budaya yang Terdifrensiasi

Guru SD di Indonesia sejak dekade 1980-an adalah guru SD yang umumnya direkrut secara *booming*, khususnya dari tamatan SPG (sekolah Pendidikan Guru). Khusus di kawasan Propinsi Sumatera Barat dan “Sumatera bagian tengah” lainnya, guru SD di-*supply* dari jebolan SPG Padang, SPG Padang Panjang, SPG Bukittinggi, dan SPG Payakumbuh. Begitu besarnya kebutuhan guru SD di saat itu, lima kota besar di Sumatera Barat mendirikan Sekolah Pendidikan Guru, termasuk juga SGO (Sekolah Guru Olah Raga) dan PGA (Pendidikan Guru Agama). Dari ketiga wahana pendidikan guru untuk sekolah dasar itu, kewenangan mengajar guru SD juga dipetakan menurut latar belakang pendidikannya, di mana guru SD yang berasal dari tamatan SPG mengajar sebagai “Guru Kelas”, dari tamatan PGA mengajar sebagai “Guru bidang studi Agama” dan dari tamatan SGO mengajar sebagai “Guru bidang studi Olahraga”.

Khusus menguak fenomena guru kelas, maka ketika kita masih belajar di bangku SD pada beberapa puluh tahun silam, tidaklah salah jika kita menganggap bahwa guru SD adalah “guru yang amat pintar”. Seluruh mata pelajaran terkesan bisa dikuasai dan kesemuanya diajarkan di satu kelas, kecuali untuk Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmanai (sekarang berganti nama menjadi PENJASORKES=Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan). Itulah dilema *menahun* guru kelas tamatan SPG, yang ikhwalnya memang berwenang dan bertanggung jawab mengajarkan banyak mata pelajaran (*mutisubject*) atau *multidiciplinary* di SD.

Andaikata di sebuah SD hanya ada enam kelas dan 8 (delapan) orang guru saja yang berlatar belakang pendidikan SPG atau D2 PGSD Guru Kelas, maka biasanya lima orang guru dari SPG membina masing-masing satu kelas dari kelas I - V, dan jika perlu Kepala Sekolah “memegang” maksudnya menjadi Walikelas di kelas VI. Guru olahraga dan agama mengajar di setiap kelas karena mereka bukan guru kelas, melainkan guru bidang studi. Siswa SD juga akan menganggap bahwa guru yang mengajar di Kelas I adalah *Ibu Kelas I*, ada *Bapak Kelas II*, *Ibu Kelas III*, dan seterusnya, termasuk *Ibu agama* dan *Bapak Olahraga*. Setidaknya ada 6 (enam) mata pelajaran (di luar Pendidikan Agama dan olahraga, siap diajarkan oleh satu orang Guru Kelas di SD pada setiap minggunya, mulai dari *Bahasa Indonesia*, *IPA*, *IPS*, *Matematika*, *Pendidikan Kewarganegaraan*, termasuk *Seni Budaya dan Keterampilan* (sebagaimana dalam KTSP yang sekarang diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Kurikulum untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).

Sebenarnya yang menjadi catatan bagi penulis, meskipun bukan isu yang baru lagi, adalah masalah kompetensi Guru Kelas di SD yang “*multisubject*” (mengajarkan banyak pelajaran) secara “*Multidisciplinary*” (beraneka disiplin ilmu), termasuk membidangi Pendidikan Seni Budaya, yang masuk kategori kurikulum “terdifrensiasi” atau yang sifatnya berbeda/khusus. Dari sisi kajian kurikulum, ada tiga mata pelajaran di SD yang cakupan materinya dan metode pembelajarannya mesti disiasati secara berdiferensiasi (berbeda/khusus), begitu juga pada jenjang pendidikan menengah. Ketiga mata pelajaran dimaksud, sebagaimana disinggung dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 itu adalah:

- (a) *Pendidikan Agama*, dengan cakupan materi pada pembentukan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia (mencakup etika, budi pekerti, atau moral);
- (b) *Penjasorkes*, dengan cakupan materi pada peningkatan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat bagi siswa; serta
- (c) Pendidikan Seni dan Budaya dan Keterampilan, dengan cakupan materi pada meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni ini mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.

Dari ketiga mata pelajaran terdifrensiasi itu, dua mata pelajaran (yaitu Pendidikan Agama dan Penjasorkes) sudah sejak lama diposisikan sebagai pelajaran berbasis bidang studi, sehingga secara pedagogik tidak akan menemui banyak masalah. Kualifikasi ijazah PGA dan SGO yang disetarakan pada program D2 sampai S1 PGSD Penjas dan Pendidikan Agama, akan sangat membantu guru SD mengembangkan kegiatan belajar mengajar dengan baik di kedua bidang studi tersebut. Namun akan lain duduk perkaranya dengan Pelajaran Seni budaya dan Keterampilan yang diajarkan oleh Guru Kelas. Banyak pihak selama ini menyangsikan kalau Guru Kelas di SD dianggap “tidak begitu kompeten” membelajarkan Seni Musik, Seni Tari, dan Seni Rupa” dalam rumpun Seni Budaya

serta keterampilan sebagai pelajaran yang terdiferensiasi sesuai tujuan, proses, dan hasil belajar yang dikehendaki.

2. Pelajaran Seni Budaya di SD, sebuah Sikap Medua

Dengan sistematika kurikulum SD yang sekarang, dimana pelajaran Seni Budaya belum dibelajarkan oleh seorang guru bidang studi yang “*a field of study*” (satu bidang studi), namun masih ditangani oleh Guru Kelas yang *Multidisciplinary*, maka selama itu pula pembelajaran seni budaya “disamakan saja” dengan pelajaran yang umum (Bahasa Indonesia, Matematik, IPA, dan sebagainya). Hasil pembelajarannya pasti “jauh panggang dari api”. Kegiatan belajar akan cenderung mementingkan deskripsi materi yang bersifat hafalan, lebih mengutamakan standar hasil, tidak masuk akal, dan mungkin tidak manusiawi karena kejar target kurikulum semata. Situasi pembelajaran seperti ini jelas tidak menarik, tidak menumbuhkan pemahaman, dan akan membosankan bagi siswa. Akhirnya hasil pembelajarannya menjadi kontraproduktif dengan ide pembelajaran yang terdiferensiasi karena tidak sesuai disiplin ilmunya. Pertanyaannya, “Seberapa mampu Guru Kelas mampu mengaktualisasikan dirinya untuk mengajarkan Pendidikan Seni Musik secara berkualitas sebagai pembelajaran bercorak bidang studi yang terdeferensiasi di SD?” Jawabnya, mungkin “*hidup Segan, matipun tak mau.*”

Penulis sedikit berlega hati jika pada perkembangan terakhir, sudah ada beberapa Kabupaten dan Kota di Indonesia, yang berani mengambil kebijakan desentralisasi sektor pendidikan, yaitu mendistribusikan guru berkualifikasi S1 Bidang Studi Seni Budaya (misalnya dari Jurusan/Prodi Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik) yang diperkenankan mengajar di SD. Meskipun kebijakan ini belumlah lazim, ternyata kebijakan otonomi pendidikan dari beberapa pemerintah Kabupaten dan Kota ini mampu membuka mata banyak pemerhati pendidikan, bahwa penanganan pembelajaran Seni Budaya di SD yang dilakukan oleh guru bidang studi kesenian berlatar LPTK ternyata menunjukkan hasil yang lebih baik. Namun demikian, penulis belum punya data kongkrit, seberapa banyak sarjana Sendratasik FBS dari berbagai LPTK di Sumatera yang telah diproyeksikan mengajar di SD pada berbagai kawasan. Paling tidak, dengan mengambil sampel di Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang Propinsi Sumatera Barat di lima tahun terakhir, kebijakan otonom pemerintah daerah bidang pendidikan ini sudah dilaksanakan secara proporsional, meskipun saat ini tertunda lagi akibat adanya keputusan moratorium pengangkatan PNS dari pemerintah. Namun demikian, di beberapa sekolah swasta pada banyak kawasan di Sumatera Barat khususnya dan di Sumatera pada umumnya, sudah terindikasi luas bahwa guru S1 Seni Budaya yang mengajar di SD sudah lumayan banyaknya, sebagaimana hal yang sama juga sudah diterapkan di banyak sekolah di kawasan pulau Jawa. Mencermati perkembangan ini, penulis punya pemikiran tersendiri, bahwa sesungguhnya yang mempunyai “sikap mendua” atau menerapkan standar ganda dalam proses rasionalisasi pembelajaran Seni Budaya di SD justru pada level kebijakan pendidikan secara nasional yang tidak semuanya terjadi di daerah. Perkembangan yang menggembirakan ini mestinya harus dipublikasikan kepada masyarakat, untuk menunjukkan bahwa ternyata masih ada pemerintah daerah yang memikirkan nasib pelajaran Seni Budaya di SD walau persentasenya amat sedikit sementara pemerintah pusat belum begitu serius mengendakannya.

3. Pelajaran Seni Musik di SD, Pembelajaran yang Berdiferensiasi Humanitas

Apakah yang dimaksud dengan mata pelajaran yang terdiferensiasi itu? Jawabnya bisa dipahami dari adanya pemetaan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang dibedakan atas pelajaran bersifat umum dan khusus. Melihat cakupan materi dan maksud pembelajarannya, maka pelajaran Agama, Penjasorkes dan Pendidikan Seni Budaya mesti dikelompokkan pada pelajaran terdiferensiasi karena bercirikan humaniora.

Pelajaran humaniora adalah pelajaran yang diharapkan dapat menjadikan peserta didik lebih manusiawi (*humanior*). Semua unsur dan tata nilai yang dikembangkan dalam pembelajaran humaniora diharapkan dapat menjadikan siswa memiliki harkat dan martabat yang tinggi pada rasa kemanusiaannya. Jika lebih dalam lagi, maka pendidikan humaniora menekankan pada pembangunan nilai humanitas (*humanity education*) yang sarat nilai afeksi, dan tidak terlalu mementingkan pembangunan aspek kognisi untuk kecerdasan intelektual yang bersifat deskriptif. Oleh sebab itu, pendidikan humaniora disebut juga dengan pendidikan tentang nilai-nilai normatif berbasis moral dan kepribadian. Pendidikan humaniora amat mendukung pembangunan kecerdasan sosio-emosional dan spiritual peserta didik untuk pembentukan manusia seutuhnya kelak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Cicero (dalam Sastrapratedja, 2001) bahwa “Humanitas secara umum diartikan sebagai suatu kualitas tentang perasaan yang dapat meningkatkan martabat kemanusiaan, karena lebih mementingkan fungsi normatif daripada deskriptif”.

Sungguh sesuatu pemandangan yang melegakan, jika sekiranya pelajaran seni musik di SD dapat dibelajarkan guru SD secara berdiferensiasi humaniora atau humanitas itu. Sebagaimana belajar agama yang “diajarkan guru bidang studi agama”, tidak lagi sekedar menghafal (*to memorize*) nama-nama Nabi misalnya, melainkan memberikan pemahaman kepada siswa tentang nilai-nilai humaniora kejuangan spiritual menegakkan *asma illahi* dari sejarah kenabian yang dipelajari. Begitu juga dengan pelajaran Penjasorkes yang diajarkan “guru bidang studi olahraga”, yang bukan sekedar menyuruh siswa menghafal panjang dan lebar lapangan sepakbola 120 x 90 meter saja, melainkan dengan mengajak mereka bermain sepakbola di lapangan bersama-sama, guna membangun semangat kerjasama *teammwork* di antara siswa. Saat bermain sepakbola, siswa yang satu adalah bagian dari semangat yang lain untuk suatu tujuan yang diperjuangkan bersama.

Namun dari beberapa survei yang penulis lakukan di banyak SD di kawasan Sumatera, nasib pelajaran musik dalam rumpun “*four in one*” Seni Budaya di SD tidak sebaik pelajaran agama dan pelajaran olahraga. Pelajaran seni musik “yang bukan diajarkan oleh seorang guru bidang studi kesenian” tapi berdampingan dengan *seabrek* mata pelajaran umum yang diajarkan Guru Kelas terkesan agak dipinggirkan. Jangankan hendak menggeser dari pemahaman deskriptif ke normatif pada tuntutan pelajaran yang terdiferensiasi humanitas, mendudukkan substansi dasar pelajaran musik di SD saja amatlah susah. Bagaimana mungkin seorang guru SD mampu menggali nilai-nilai moral melalui seni sejak dini, sementara mengajarkan cara “bernyanyi yang lumayan agak benar” saja sudah tidak menarik, membingungkan, dan malah membosankan siswa. Notasi musik (angka atau balok)

yang semulanya merupakan jalan untuk membentuk pengertian musik justru dijadikan sebagai objek hafalan yang cenderung dideskripsikan dengan ceramah, tanya jawab, diskusi, dan tidak dan tidak diaplikasikan untuk mendukung unjuk kebolehan siswa dalam praktek musik yang sebenarnya. Wajar kiranya jika pelajaran musik “tampa makna ini” akhirnya diberi predikat sebagai pelajaran “pelengkap”, “pelajaran lapis kedua” atau “pelajaran anak tiri” dari serangkaian pelajaran umum lain dianggap lebih bermakna dan lebih penting.

Hasil survei sementara menunjukkan bahwa kebanyakan guru kelas yang *notabene* memang tidak mengerti dengan esensi pelajaran seni musik di SD mengira bahwa belajar musik hanya sekedar “bernyanyi bersama”, “sorak-sorak bergembira”, “bertepuk tangan” dan tak jarang meyuruh siswa menyanyi bebas di depan kelas. Celakanya, ternyata kondisi pendidikan seni musik yang salah arah dan salah urus ini nyatanya juga belum banyak disentuh oleh diskusi para pakar dan pemerhati pendidikan, termasuk para pelaku Pendidikan Seni Budaya itu sendiri. Seharusnya kalangan perguruan tinggi, guru bidang studi Seni Budaya, para perancang kurikulum dan pemerintah daerah, perlu duduk bersama untuk mengatasi persoalan pelajaran seni di SD, kalau memang pendidikan di Indonesia tidak ingin membentuk insan terdidik yang “pincang”. Sudah banyak penelitian yang membuktikan, jika pendidikan Indonesia yang terlalu mengutamakan pengembangan aspek penalaran intelektual, menyebabkan siswa-siswa sekolah dan kaum terpelajar nantinya menjadi tidak berkarakter, kerap mengalami dekadensi moral, dan krisis identitas.

4. Pelajaran Seni Musik di SD, Pembelajaran yang Berdiferensiasi Estetika

Apalah daya seorang “Ibu Wartini” misalnya, yang mengajar di Kelas IV pada sebuah SD Impres di suatu kawasan pedalaman Sumatera Barat kebingungan untuk mengajarkan seni musik dengan benar. Saat ia mengajar musik yang biasanya di jam “pamungkas” alias jam terakhir, ia kerap mengajarkan notasi musik dan lagu melalui ceramah dan ujung-ujungnya menyuruh siswa menyanyi dan menyanyi di depan kelas. Jika sang guru tidak datang atau malas masuk kelas, kegiatan belajar dapat diganti guru piket dengan kegiatan *menggambar bebas*, atau jika perlu diganti dengan pelajaran yang lebih penting (IPA, Bahasa Indonesia, Matematik misalnya). Ketika persoalan ini ditanyakan kepada guru yang bersangkutan, jawabnya, “*Begini saja sudah syukur Pak. Meskipun amburadul meski dan pas-pasan, toh kami masih melaksanakan kurikulum. Kami kan bukan guru bidang studi kesenian. Kami tidak bisa bernyanyi, tak paham notasi, sementara materi pelajaran Seni Budaya yang mesti diajarkan, banyangknya minta ampun. Tambah lagi waktu belajarnya yang sangat terbatas, membuat kami para guru tidak mengerti lagi dengan apa yang kami ajarkan*”.

Dari ilustrasi hasil wawancara di atas, sepiintas dapat kita temukan bahwa untuk sekedar mengajarkan aspek-aspek pengetahuan semata, guru SD diyakini bisa mengajar seni musik sebagaimana yang juga diperankan pada mata pelajaran umum yang “tidak terdiferensiasi” lainnya. Namun ketika guru SD dituntut untuk membelajarkan siswa dengan pelajaran musik yang ada kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi estetika, maka persoalan kedua ini juga tidak terpahami dengan baik.

Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran seni musik sebagai pelajaran estetika di SD, sebagaimana yang disebutkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006? Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa pelajaran estetika adalah pelajaran tentang keindahan, sebagaimana kata estetika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *αισθητική* (dibaca *aisthetike*). Pertama kali istilah ini digunakan oleh filsuf Alexander Gottlieb Baumgarten pada 1735 untuk menjelaskan cara mempelajari hal-hal yang bisa dirasakan lewat perasaan, seperti musik, tari, teater, seni rupa, dan sebagainya (Mudji Sutrisno, 1999). Lalu apa urgensinya pengetahuan estetika di SD melalui pendidikan seni? Sebagaimana banyak disinyalir para ahli bahwa, jika pemahaman estetika pada cabang-cabang seni diajarkan secara benar sejak usia dini melalui pengenalan rasa “keindahan dalam seni” (*sense of art*), biasanya seorang anak akan bisa direfleksikan rasa keindahan itu kapan saja dan di mana saja sepanjang hayatnya. Sebab ketika pemahaman tentang nilai-nilai seni dan keindahan itu sudah melekat pada jiwa anak secara tepat sejak usia dini, maka sistem sel *otak mamalia* (yang mengatur emosi) serta sistem sel otak *neokorteks* (yang mengatur berpikir abstrak), akan mudah merespon pembentukan pola sikap yang sarat dengan nilai kreatifitas, tutur yang baik, rasa empati, dan umumnya untuk pengembangan hubungan interpersonal yang baik pula. Dengan mengambil contoh saat siswa SD belajar lagu “Pelangi-pelangi” di kelas III SD, sebenarnya tidaklah tepat sasaran apabila syair lagu itu dinyanyikan guru berulang-ulang bersama siswa sambil bersorak-sorak, hanya untuk sekedar mengejar kemampuan *me-record* teks lagu yang berujung hafalan lisan yang hampa makna. Untuk tujuan pemahaman normatif, berdimensi estetik, guru kelas perlu menggali tema lagu “Pelangi-pelangi” sebagai sumber ide cerita afeksi-humanitas yang mendidik. Guru mesti mampu untuk menjelaskan keagungan Tuhan yang telah menciptakan alam semesta untuk manusia dan makhluk lainnya dengan beraneka rupa kepada siswa melalui lagu “Pelangi-pelangi” itu. Pada tingkat yang lebih abstrak, guru SD bisa melanjutkan penjelasannya dengan menunjukkan secara kongkrit nilai keindahan warna pelangi kepada siswa, meskipun akhirnya siswa menyerapnya dengan cara berfikir kongkrit pada analisis yang masih terbatas. Tapi sayang, berbagai harapan muluk pada pembelajaran ideal seni musik di SD ini tetap akan sirna sepanjang guru SD yang berlatar belakang Guru Kelas hanya sekedar mampu mendeskripsikan pengetahuan secara hafalan pada syair lagu, menyebutkan nama-nama para pencipta lagu, termasuk menghafalkan jenis-jenis notasi, bentuk not serta nilainya, tanpa bisa mengekspresikan dan mengaktualisasikan musik tersebut.

Adanya kesalahan pengelolaan pembelajaran musik di SD yang tidak tepat sasaran seperti di atas, biasanya akan melatarbelakangi berbagai kesalahpahaman pelajaran seni musik pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kesalahan yang sama pasti akan terus terjadi pada pelajaran seni musik di SMP dan SMA, di mana siswa tidak akan mampu merefleksikan pengetahuan musik dari sekedar hafalan deskriptif ke pemahaman normatif yang bernilai humanitas dan estetika tadi. Sehingga tidak salah juga manakala persoalan pembelajaran seni musik di SD yang salah urus ini diilustrasikan dengan peribahasa “*long-therm mororize*”: “*Kecil teranja-anja* (belajar musik dengan tidak benar), *besar terbawa-bawa* (terus belajar musik dengan tidak benar), *tua terobah tidak*” (selamanya belajar musik dengan tidak benar). Perwajahan pembelajaran seni musik di SD saat ini sesungguhnya kian tidak sejalan dengan tujuannya semula, karena berbanding terbalik dengan “ekspos” kegiatan

ekstrakurikuler seni di luar kelas. Nyatanya sekolah bangga kalau ada guru SD di luar jam belajar di kelas mau mengurus siswa dalam menunjukkan kebolehan seni dalam bernyanyi, menari, dan bersandiwara, walau kadang hanya untuk mengejar prestise atau pencitraan sekolah di mata publik dan birokrasi. Tapi ketika seorang Guru Kelas kembali ke dalam situasi pembelajaran seni di kelas, ia menjadi pasrah, tidak mengerti, dan kebingungan dengan materi pelajaran yang mesti diajarkan kepada siswa, karena kekurangmampuan mereka untuk menerjemahkan isi kurikulum Seni Budaya yang berdifrensiasi itu.

5. Pelajaran Seni Musik di SD, Berdimensi *Multidiciplinary - Interdiciplinary*

Sampai survei penulis menyigi pada pencarian sumber-sumber kepustakaan yang dapat memberikan petunjuk begitu jelas tentang bagaimana mensiasati pembelajaran musik di SD dari pengetahuan deskriptif ke pemahaman normatif, memang tidak banyak sumber tekstual berupa buku, makalah, maupun tulisan ilmiah lainnya yang telah membahas persoalan ini lebih nyata. Lalu kepada siapa guru dapat menanyakan itu semua? Untuk saat jawabnya memang hanya pada diri “guru” sendiri, atau perhatikan reaksi siswa SD saat belajar musik. Nantinya kompetensi pedagogik dan pengetahuan empirik (pengalaman) guru bersama dengan respon “belajar yang dalam corak bermain dan suasana batiniah” siswa SD-lah yang akan dapat menuntun guru menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Secara umum Delese Wear dan Janet Bickel (dalam Sastrapratedja, 2001) telah memberi petunjuk bahwa, agar guru di sekolah memiliki kompetensi dalam menkonversi sebagian isi pelajaran dari yang bersubstansi deskriptif ke normatif, ia harus melakukan perubahan-perubahan yang bersifat modifikasi terhadap penyampaian isi pelajaran secara lebih variatif. Artinya guru dapat memodifikasi berbagai komponen belajar (baik pada komponen materi, tujuan, metode, media, dan evaluasi) dalam banyak pilihan, sehingga akhirnya pelajaran seni musik dapat memfasilitasi keragaman bakat, minat, dan tingkat kesiapan belajar siswa yang berbeda-beda. Sehubungan dengan kreasi-modifikasi pembelajaran itu, ada tiga cara yang ditawarkan oleh Abdul Mukti (2011), yaitu: (a) mengeksplorasi isi pelajaran pada “*standar proses*”; (b) melakukan beragam kegiatan “*belajar yang masuk akal*”; serta (c) memberikan kesempatan kepada pembelajar dapat “*mendemonstrasikan sesuatu yang pelajari*”. Tindak lanjut dari ketiga tawaran itu, maka akan menjadi lebih baik seandainya guru SD dapat mengajarkan pelajaran seni musik dengan lebih mementingkan proses bermusiknya, bermain musik secara masuk akal, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan permainan musik itu kembali.

Mencermati permasalahan di atas dari sisi kurikulum ke-SD-an yang sekarang, maka usaha sebagian pihak yang mencoba merevitalisasi pembelajaran seni musik di SD juga masih terbentur pada desain kurikulum yang masih berlaku saai ini. Meskipun dalam KTSP 2006, disebutkan bahwa pelajaran musik di kelas I, II, dan III sudah harus dilaksanakan dengan pembelajaran tematik, sebagaimana misi yang sama akan tetap dilanjutkan pada Kurikulum 2013, tetap saja kebijakan ini belum melegakan kita, sepanjang yang mengajarkan seni musik di SD adalah seorang Guru Kelas yang berlatar pengetahuan multidisiplin. Tambah lagi dengan pemberlakuan kurikulum baru 2013 untuk SD yang kian “menggemukakan” pelajaran Seni Budaya dengan Muatan Lokal, harapan untuk menstandarisasikan pembelajaran seni musik

pada *a field study* nampaknya akan semakin menjauh dan sulit dilaksanakan, Entahlah!

Yang jelas saat ini, dampak berkelanjutan dari pembelajaran seni musik yang diajarkan oleh Guru Kelas adalah semakin “terjerembab”-nya pembelajaran ini pada kasus *interdisiplinarity* atau interdisiplinaritas. Adapun istilah interdisiplinaritas pertama kali penulis kenal dalam berbagai tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal UNESCO (1998) serta tulisan Hasan Samid (2007) tentang *transdisciplinary*, khususnya pada makalah “Pendidikan dengan Referensi Khusus pada Kurikulum”, yang dipresentasikan di Universitas Negeri Jakarta tanggal 29 Oktober 2007. Menyimak dari tulisan itu, penulis mencoba memaknai pengertian *interdisciplinarity* (interdisiplinaritas) dalam keilmuan sebagai proses penggabungan pengertian dalam satu kajian ilmu yang menyebabkan dua kondisi utama yaitu: (a) Berdampak positif, jika terjadi penguatan pengertian dan konsep-konsep pada suatu bidang ilmu; dan (2) Berdampak negatif, jika terjadi pengaburan pengertian dan konsep bidang ilmu itu sendiri. Fenomena interdisiplinaritas pada setiap bidang ilmu rentan terjadi secara alamiah, karena pada dasarnya tidak ada satupun ilmu yang berdiri sendiri, *monodisiliner* secara utuh, karena satu sama lain saling bersinggungan atau mendukung, apalagi dalam saat diterapkan dalam kehidupan nyata. Ilmu musik mungkin tidak bisa dilepaskan dari ilmu teknik, saat musik butuh instrumen musik. Ilmu musik mungkin tidak bisa dipisahkan dari IPA, karena pengetahuan tentang gelombang bunyi mendorong pemahaman tentang *acoustic* (ilmu bunyi). Malahan musik juga bersinggungan dengan dunia kesehatan, saat hasil-hasil karya musik bisa dijadikan terapi untuk kesehatan dan peningkatan kecerdasan sejak dini. Semua proses interdisiplinaritas ini adalah proses yang ditimbulkan dari usaha mencari hingga menemukan (*inquiry to discovery*) suatu bidang pengetahuan, guna didapatkannya “jalan lain” untuk bisa memahami suatu kerumitan fenomena, menyederhanakan konsep, menalar secara logika, dan pengertian yang dialihbahasakan.

Berbeda dengan hal di atas, justru kasus interdisiplinaritas yang terjadi pada pelajaran seni musik di SD bukanlah sesuatu yang alami dan bisa ditolerir, melainkan suatu kasus kesimpangsiuran pengertian yang umumnya berawal dari ketidaktahuan guru Kelas yang “bukan guru bidang studi”. Terjadinya kasus campuraduk pengertian musik dengan pengertian bidang ilmu lain dalam mengajar ini sering disebabkan oleh adanya kegiatan mengajar yang sering “berimprovisasi” lantaran ketidakpahaman dengan materi pelajaran musik yang diajarkan. Kasus interdisiplinaritas dimaksud sering terjadi saat guru kesulitan menarik benang merah antara pengertian seni musik dengan pemahaman matematik atau ilmu hitung. Kasus ini kian mengemuka saat pelajaran musik di SD juga masih berlandaskan notasi angka, yang sepenuhnya diterima kebanyakan guru kelas dari pengetahuan musik yang diterima sejak SPG atau D2 PGSD. Lantaran kasus interdisiplinaritas ini adalah suatu kekeliruan yang sering tidak disengaja, tapi sebagai wujud dari sebagian usaha guru mencoba menalar secara logika suatu pengertian musik yang tidak bisa dicerna guru atas segala keterbatasan pengetahuannya, maka kasus interdisiplinaritas seperti ini dapat penulis katakan sebagai “interdisiplinaritas yang tidak baku”. Jika masalah ini tidak dicarikan pemecahannya, penulis yakin jika interdisiplinaritas seni musik di SD bisa menjadi *bumerang* kekeliruan yang berkesinambungan, kian membudaya,

dan amat sulit untuk diubah ke arah pengertian musik yang benar. Implikasinya, siswa SD yang nantinya akan belajar musik di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, akan tetap menyimpan wawasan pengetahuan dan pemahaman seni musik yang keliru, dan akan sulit untuk dibetulkan kembali. Wajar kiranya pelajaran musik di SDP dan SMA sampai hari ini masih dalam konsep yang keliru, karena kekeliruan itu sudah begitu mendasar dan membudaya, yang telah dimulai sejak jenjang pendidikan dasar di SD.

6. Interdisiplinaritas pada Pembelajaran Musik di SD

Meskipun penelitian ini belum sepenuhnya rampung, setidaknya pengalaman meneliti dan pengalaman penulis mengajar di PGSD-FIP UNP dapat menunjukkan bahwa telah terjadi kasus interdisiplinaritas dalam pelajaran musik di SD seperti di beberapa sampel kegiatan belajar musik di beberapa SD di kawasan kabupaten Lima Puluh Kota dan Tanah Datar (Sumatera Barat) dan di kawasan Riau, Jambi, dan Bengkulu. Beberapa kasus interdisiplinaritas musik berbaur tidak baku dengan pelajaran matematik di SD, di antaranya adalah:

a. Interdisiplinaritas: Bentuk dan Nilai Not

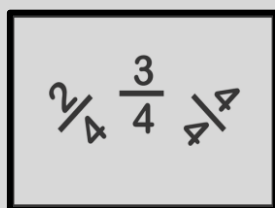
The image shows a musical score for a piece titled "Seperempat Piring". The score is written on a staff with a key signature of one flat (B-flat) and a tempo marking of "Moderato". The lyrics are written below the staff, and the rhythmic notation consists of numbers (1, 2, 3, 4, 5) placed above the staff, indicating the duration of each note in terms of beats. The lyrics are: "Am - per - ampér pi - sang pi - sang - ku ba - lam ma - sek Ma - sek bi - gi di - hu - rung ba - ri - ba - ri Ma - sek bi - gi di - hu - rung ba - ri - ba - ri Man - ga le - pak man - ga le - pak pa - lah ka - ya bang - kok Bang - kok di - ma - kan a - pi a - pi - nya clang cu - ru - pan Bang - kok di - ma - kan a - pi a - pi - nya clang cu - ru - pan Bang - ma - nang ba - hi ku - tung di - ki - ti - pi da - wang Ma - nang ba - hi ku - tung di - ki - ti - pi da - wang".

Kasus interdisiplinaritas yang pertama ini umumnya disebabkan oleh adanya usaha guru SD untuk mencoba mengartikan maksud besaran nilai not dalam notasi angka yang dapat dihitung dengan satuan "ketukan". Apabila satu ketukan sama dengan satu pukulan, maka not angka yang bernilai tiga ketuk dapat dibunyikan sepanjang tiga kali pukulan. Memang benar adanya, jika nilai "durasi" (panjangnya) not yang dibunyikan dalam musik diukur dalam satuan ketukan, tapi pemahamannya tidak sesederhana yang dijelaskan oleh guru SD kepada siswanya. Umumnya guru SD sering menjelaskan bentuk dan nilai not dalam musik

(untuk not berdurasi *penuh*, *setengah* ketuk, *seperempat* ketuk, dan seterusnya) hanya dalam pengenalan jumlah ketukan semata. Namun seberapa cepat guru mengetuk atau memukulkan penggaris di meja atau di papan tulis, tidak pernah diperhitungkan dan dianalisis guru. Dengan demikian, interdisiplinaritas yang menghitung durasi not secara hitungan ketukan yang kaku ini, telah mengaburkan pemaknaan tanda tempo dalam musik yang justru lebih berpengaruh besar terhadap nilai not yang sesungguhnya. Suatu durasi not tidaklah valid jika hanya diitung dengan kata-kata "*satu, dua, tiga, dan empat*" oleh guru, tanpa sebelumnya guru memahami seberapa lama durasi untuk "satu ketukan" dimainkannya. Jika begini cara guru SD memahami nilai ketukan pada notasi, tidak disalahkan juga jika siswa SD yang belajar musik sulit membedakan tempo lagu pada durasi not yang berbeda panjang pendeknya.

b. Interdisiplinaritas: Tanda Birama

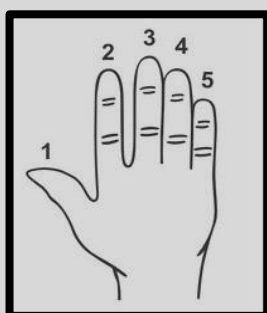
Kasus interdisiplinaritas kedua yang sering terjadi dalam pembelajaran seni musik di SD adalah tentang tanda birama (*time signature*). Pada SD di beberapa



kawasan, ditemukan guru SD yang mengajarkan tanda birama dalam seni musik ini pada pengertian yang bervariasi. Ada yang tetap mencoba memahami tanda birama sebagai “tanda jumlah ketukan dan nilai not” seperti yang ada dalam pengertian musik, namun tak sedikit pula yang guru SD yang nyata-nyata mengatakan bahwa tanda birama dalam musik tidak ubahnya dengan bilangan pecahan (*friction*). Hal ini tentu sudah jauh menyimpang dari pengertian tanda birama dalam notasi angka, yang sejak abad ke-X Masehi telah diperkenalkan oleh *Guido Arrezo* di Italia. Boleh jadi, pengertian tanda birama dalam notasi angka yang keliru ini juga banyak berlaku di berbagai SD kawasan di Indonesia yang guru-gurunya belatar SPG.

Entah dari mana asal mula pengertiannya, sehingga sebagian guru SD yang mengajar seni musik di beberapa kawasan di Sumatera Barat dan luar Sumatera Barat bisa mengatakan bahwa “*untuk memahami tanda birama dalam sebuah lagu, maka bilangan yang ada dalam tanda birama dapat disamakan dengan bilangan pecahan*”. Jika tanda birama sebuah lagu adalah $3/4$, maka bilangan atas “angka 3” dapat dikatakan sebagai “*pembilang*” dan bilangan bawah “angka 4” dapat dikatakan sebagai bilangan penyebut”. Jika demikian guru mengajarkan tanda birama kepada siswa SD, maka suatu kekeliruan besar sejak dini telah terjadi. Boleh jadi siswa akan punya inspirasi tersendiri untuk membuat persamaan tanda birama $2/4$ sama dengan 0,50 pada Lagu Hari Merdeka dan tanda birama $3/4$ sama dengan 0,75 pada lagu Bagimu Negeri. Jika dilihat dari pemahaman guru SD yang tidak memahami maksud dan kegunaan tanda birama, logikanya bilangan penyebut dalam pecahan tanda birama lagu dapat membagi bilangan pembilangnya. Padahal bukan demikian maksud pengertian tanda birama yang sesungguhnya dari dalam musik. Bilangan atas tanda birama justru memberi petunjuk tentang jumlah ketukan dalam satu birama, dan bilangan bawah sebagai pemberi petunjuk tentang nilai not yang dipakai.

c. Interdisiplinaritas: Solmisasi



Teknik “*solmisasi*” adalah teknik penyebutan suku kata *do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do* pada setiap tingkatan nada dalam tangga musik. Teknik solmisasi dalam musik ini telah digunakan hampir seragam di seluruh dunia, di mana bersolmisasi dalam bentuk solfège adalah cara yang paling umum dilakukan di Eropa dan Amerika Utara. Sekurang-kurangnya ada dua teori tentang asal usul teknik solmisasi dalam musik. Pertama, adalah solmisasi dari suku kata yang terdapat pada syair *Hymne of St. John* yang ditulis Paulus Diaconus pada abad ke-VIII. Kedua, adalah teknik solmisasi menurut Franciszek Meninski, sebagaimana diperkenalkan dalam tulisan *Thesaurus Linguarum Orientalum* di tahun 1680 (dikutip pada Samuel D. Miller (1973) dalam Wikipedia).

Beralih ke penggunaan teknik solmisasi menggunakan notasi angka pada musik, maka sebutan nada *do* bisa diwakilkan dengan “angka 1”; *re* = 2; *mi* = 3; *fa* = 4; *sol* = 5; *la* = 6, *si* = 7, dan *do* (oktaf) = 8. Jelas-jelas penggunaan notasi angka dalam musik telah bersinggungan dengan lambang bilangan yang biasa dipakai dalam ilmu hitung atau matematik. Sendainya guru tidak sadar meluruskan pemahaman saat belajar musik bagi siswa SD antara penggunaan angka yang mewakili penyebutan nada dan angka sebagai lambang bilangan, maka akan kaburlah pengertian musik sejak awalnya. Guru harus mampu membedakan angka dari “yang rendah ke yang tinggi” berarti “menyuarakan nada” dari nada yang rendah ke nada yang tinggi” dan membedakan angka sebagai bilangan yang menunjukkan jumlah atau ukuran. Tapi sayangnya, dalam beberapa penyampaian materi solmisasi pada pelajaran musik di SD, kasus interdisiplinaritas justru juga terjadi. Bahayanya lagi, jika ada guru SD yang menggunakan “hittungan jari tangan” untuk membantu siswa melafazkan nada dengan teknik solmisasi tersebut, yang nyata-nyata sudah tidak sesuai dengan maksud nada yang dapat disuarakan sesuai tinggi-rendahnya. Dengan teknik hitungan jari tangan seperti ini, otomatis guru telah menempatkan siswa SD belajar musik dengan menggunakan gaya berfikir abstrak yang merupakan kebutuhan belajar orang dewasa. Pantas kiranya penggunaan solmisasi dalam pelajaran musik di SD sampai hari ini tidak dipahami siswa dengan baik dan sulit untuk diterapkan dalam bernyanyi secara baik pula.

C. Penutup

Mungkin itulah tiga kasus interdisiplinaritas yang tergolong meyelok, yang dapat penulis kemukakan sementara pada kertas kerja Semirata kali ini, sehubungan kegiatan penelitiannya yang sedang terus berlanjut pada survei-survei yang dapat menemukan berbagai kesalahpahaman Guru Kelas dalam mengajarkan seni musik di SD secara interdisiplinaritas. Kita yakin jika permasalahan interdisiplinaritas bidang musik dengan matematik dan musik dengan bidang ilmu lainnya akan dapat diungkap, sepanjang penelitian memamng menemukan adanya berbagai kekeliruan pembelajaran seni musik di SD yang bisa dicermati lebih luas atau dianalisis lebih mendalam dari latar belakang *multidisciplinery* seorang Guru Kelas. Samapi pada tulisan yang telah dipaparkan ini, smentara penulis berkesimpulan bahwa masalah interdisiplinaritas pengetahuan seni musik di SD di berbagai kawasan di Sumatera sudah lama terjadi. A pakah hal itu sebagai akibat dari proses penalaran guru terhadap materi pelajaran yang keliru di lapangan, atau sudah merupakan kekelruan yang membudaya sejak guru belajar musik di almamaternya.

Yang jelas, masalah tidak bisa dibiarkan berlalu tanpa usaha pelurusan pengertian dari para guru maupun pemerhati pendidikan di bidang musik. Sebab implikasi kesalahpahaman dalam pembelajaran musik di SD oleh guru non bidang studi saat ini bisa dirasakan dengan jelas. Dampak universal dari kekeliruan pembelajaran musik di SD itu sudah berimplikasi kronik pada pembelajaran musik di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yaitu silitnya mengajarkan seni musik yang bermutu sesuai dengan pemahaman yang tepat bagi siswa sekolah sampai sekarang.

Daftar Pustaka

- Changing teaching practices: Using curriculum differentiation to respond to students' diversity.* UNESCO, Paris, 2004.
- Miller, Samuel D. (1973). Guido d'Arezzo: Medieval Musician and Educator; *Journal of Research in Music Education*, The National Association for Music Education
- Mukti, Abdul (2011), Pembelajaran Berdiferensiasi, pada <http://my.opera.com/muktibogor/blog/2011/07/03>
- Sutrisno, Mudji (1999). Kisi-kisi Estetika, Yogyakarta: Kanisius
- Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi kurikulum untuk satuan pendidikan dasar dan menengah).
- Samid, Hasan (2007). *Transdiciplinari* dalam Pendidikan dengan Referensi Khusus pada Kurikulum. Jakarta: Seminar *Transdiciplinari* di UNJ tanggal 29 Oktober 2007.
- Sastrapratedja, M. (2001). *Pendidikan sebagai Humanisasi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- UNESCO. (1998). *Transdiciplinari; Stimulating Sinergies, Integrating Knowledge*. (diterjemahkan dalam makalah seminar tentang *Transdiciplinari* oleh Hamid Hasan di Universitas Negeri Jakarta, 29 Oktober 2007)
- Wear, Delese and Bickel, Janet (2000). *Educating for Professionalism. Creating Culture of Humanism in Medical Education*. Iowa: University of Iowa Press